

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR : 62 TAHUN 2015
TENTANG : PELIMPAHAN WEWENANG
PELAYANAN PERIZINAN
DAN NON PERIZINAN
KEPADA KEPALA BADAN
PENANAMAN MODAL DAN
PERIZINAN DAERAH
KABUPATEN TABANAN

NO	PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	DASAR HUKUM PENERBITAN PERIZINAN	SKPD ASAL	INSTANSI YANG MENDATANGANI
1	2	3	4	5
I	PELAYANAN PERIZINAN			
1	SITU	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Daerah Kab. Tabanan Nomor 5 tahun 2013 tentang surat Izin Usaha Perdagangan, Izin Usaha Industri, Tanda Daftar Gudang dan Tanda Daftar Perusahaan - Peraturan Bupati Tabanan Nomor 63 tahun 2013 tentang tata cara dan persyaratan permohonan Surat Izin Usaha Industri, Tanda Daftar Gudang dan Tanda Daftar Perusahaan 	BPMPD	Kepala BPMPD
2	SIUP	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Daerah Kab. Tabanan Nomor 5 tahun 2013 tentang surat Izin Usaha Perdagangan, Izin Usaha Industri, Tanda Daftar Gudang dan Tanda Daftar Perusahaan - Peraturan Bupati Tabanan Nomor 63 tahun 2013 tentang tata cara dan persyaratan permohonan Surat Izin Usaha Industri, Tanda 	BPMPD	Kepala BPMPD

		Daftar Gudang dan Tanda Daftar Perusahaan		
3	IZIN USAHA INDUSTRI	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 5 Tahun 2984 tentang Perindustrian - Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 tahun 1995 tentang izin usaha industri - Peraturan Bupati Tabanan Nomor 63 tahun 2013 tentang tata cara dan persyaratan permohonan Surat Izin Usaha Industri, Tanda Daftar Gudang dan Tanda Daftar Perusahaan 	BPMPD	Kepala BPMPD
4	TANDA DAFTAR PERUSAHAAN	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Daerah Kab. Tabanan Nomor 5 tahun 2013 tentang surat Izin Usaha Perdagangan, Izin Usaha Industri, Tanda Daftar Gudang dan Tanda Daftar Perusahaan - Peraturan Bupati Tabanan Nomor 63 tahun 2013 tentang tata cara dan persyaratan permohonan Surat Izin Usaha Industri, Tanda Daftar Gudang dan Tanda Daftar Perusahaan 	BPMPD	Kepala BPMPD
5	IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN	<ul style="list-style-type: none"> - Perda No. 16 tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 9 tahun 2013 tentang Bangunan Gedung 	BPMPD	Kepala BPMPD
6	TANDA DAFTAR GUDANG	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5 tahun 2013 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan, Izin Usaha Industri, Tanda Daftar Gudang dan Tanda Daftar Perusahaan 	BPMPD	Kepala BPMPD

		- Peraturan Bupati Tabanan Nomor 63 tahun 2013 tentang tata cara dan persyaratan permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan, Izin Usaha Industri, Tanda Daftar Gudang dan Tanda Daftar Perusahaan		
7	IZIN GANGGUAN (HO)	- Perda No. 17 tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan	BPMPD	Kepala BPMPD
8	SITU MIKOL	- Perda No.21 tahun 2011 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	BPMPD	Kepala BPMPD
9	SIUP MIKOL	- Perda No.21 tahun 2011 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	BPMPD	Kepala BPMPD
10	IZIN PENYOSOHAN GABAH/BERAS	- Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 7 tahun 2011 tentang Izin Penyosohan Gabah	BPMPD	Kepala BPMPD
11	PENGKAPLINGAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN	- Peraturan Bupati Nomor 74 tahun 2013 tentang Pengaturan Pengkaplingan Tanah untuk Pembangunan Perumahan dan Pemukiman di Kabupaten Tabanan	BPMPD	Kepala BPMPD
12	TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA	- Peraturan Bupati Tabanan Nomor 19 tahun 2014 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Pariwisata, Perizinan Teknis, dan Persyaratan Administrasi serta Tata Cara dari Persyaratan Pemutakhiran Tanda Daftar Usaha Pariwisata - Peraturan Daerah No. 4 tahun 2013 tentang Pariwisata	BPMPD	Kepala BPMPD
II	PELAYANAN NON PERIZINAN			
1	PERSETUJUAN PRINSIP MEMBANGUN	- Keputusan Bupati Tabanan Nomor 674 Tahun 2002 tentang	BPMPD	Kepala BPMPD

		Persetujuan Membangun	Prinsip		
--	--	--------------------------	---------	--	--

PENJABAT BUPATI TABANAN

TTD

I WAYAN SUGIADA

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI TABANAN
 NOMOR : 62 TAHUN 2015
 TENTANG : PELIMPAHAN WEWENANG
 PELAYANAN PERIZINAN
 DAN NON PERIZINAN
 KEPADA KEPALA BADAN
 PENANAMAN MODAL DAN
 PERIZINAN DAERAH
 KABUPATEN TABANAN

NO	PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	DASAR HUKUM PENERBITAN PERIZINAN	SKPD ASAL	INSTANSI YANG MENDATANG ANI
1	2	3	4	5
I	PELAYANAN PERIZINAN			
1	IZIN LINGKUNGAN	<ul style="list-style-type: none"> - UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup - PP Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan - Permen Lingkungan Hidup Nomor 08 tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen tentang tata laksana penilaian dan pelaksana dokumen lingkungan hidup serta penerbitan ijin lingkungan 	Badan Lingkungan Hidup	Kepala Badan Lingkungan Hidup
2	IZIN PENYIMPANAN SEMENTARA LB3 (LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN)	<ul style="list-style-type: none"> - UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup - Permen Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan 	Badan Lingkungan Hidup	Kepala Badan Lingkungan Hidup

		Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah.		
3	IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE AIR ATAU SUMBER AIR DAN ATAU IZIN PEMANFAATAN AIR LIMBAH KE TANAH	<ul style="list-style-type: none"> - UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup - Kepmen Lingkungan Hidup Nomor 142 tahun 2003 tentang Perubahan Atas Kepmen Lingkungan Hidup Nomor 111 tahun 2003 tentang Pedoman Mengenai Syarat dan Tata Cara Perizinan serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air. 	Badan Lingkungan Hidup	
4	IZIN PEMANFAATAN SUMBER-SUMBER AIR	- Peraturan Bupati Tabanan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengaturan Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Air Tanah dan Air Permukaan	Badan Lingkungan Hidup	Kepala Badan Lingkungan Hidup
5	IUJK	<ul style="list-style-type: none"> - UU Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik - PP Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik - Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan 		Sekretaris Daerah a.n Bupati

		<p>Pemberian Ijin Usaha Jasa Konstruksi Nasional</p> <ul style="list-style-type: none"> - Keputusan Bupati Tabanan Nomor 303 tahun 2008 tentang Pembentukan Tim Pembina Jasa Konstruksi Kabupaten Tabanan 		
6	PEMBERIAN IZIN LOKASI PENDIRIAN SATASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR	<ul style="list-style-type: none"> - UU Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi - PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 	Bagian Sumber Daya Alam Setda Kab. Tabanan	Sekretaris Daerah a.n Bupati
7	USAHA PETERNAKAN	<ul style="list-style-type: none"> - Kepmentan Nomor 404/KPST/OT.210/2002 tentang Pedoman Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan - Peraturan Bupati Tabanan Nomor 67 tahun 2013 tentang Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan dan Kesehatan Hewan 	Dinas Peternakan	Kepala Dinas Peternakan
8	USAHA POTONG HEWAN	<ul style="list-style-type: none"> - Kepmentan Nomor 404/KPST/OT.210/2002 tentang Pedoman Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan - Peraturan Bupati Tabanan Nomor 67 tahun 2013 tentang Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan dan Kesehatan Hewan 	Dinas Peternakan	Kepala Dinas Peternakan
9	USAHA PENYEDIAAN /PENGE CER DAGING	<ul style="list-style-type: none"> - Kepmentan Nomor 404/KPST/OT.210/2002 tentang Pedoman Perizinan dan Pendaftaran Usaha 	Dinas Peternakan	Kepala Dinas Peternakan

		<p>Peternakan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Bupati Tabanan Nomor 67 tahun 2013 tentang Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan dan Kesehatan Hewan 		
10	DEPO OBAT HEWAN	<ul style="list-style-type: none"> - Kepmentan Nomor 404/KPST/OT.210/2002 tentang Pedoman Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan - Peraturan Bupati Tabanan Nomor 67 tahun 2013 tentang Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan dan Kesehatan Hewan 	Dinas Peternakan	Kepala Dinas Peternakan
11	DOKTER HEWAN PRAKTIK	<ul style="list-style-type: none"> - Kepmentan Nomor 404/KPST/OT.210/2002 tentang Pedoman Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan - Peraturan Bupati Tabanan Nomor 67 tahun 2013 tentang Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan dan Kesehatan Hewan 	Dinas Peternakan	Kepala Dinas Peternakan
12	RUMAH SAKIT KELAS C DAN D	<ul style="list-style-type: none"> - Permenkes Nomor 147/Menkes/Per/I/2010 tentang perda 9 tahun 2014 tentang perijinan bidang kesehatan 	Dinas Kesehatan	Kepala Dinas Kesehatan
13	KLINIK	<ul style="list-style-type: none"> - Permenkes Nomor 028/Menkes/Per/I/2011 tentang klinik 	Dinas Kesehatan	Kepala Dinas Kesehatan
14	APOTEK	<ul style="list-style-type: none"> - Kepmenkes Nomor 1332/Menkes/SK/X/2002 tentang Perubahan Atas Permenkes Nomor 922/Menkes/Per/X/1993 tentang ketentuan tata cara ijin apotik 	Dinas Kesehatan	Kepala Dinas Kesehatan

15	TOKO OBAT	- Kepmenkes Nomor 1331/Menkes/SK/X/2002 tentang Pedagang Eceran Obat	Dinas Kesehatan	Kepala Dinas Kesehatan
16	LABORATORIUM KLINIK	- Permenkes Nomor 441/Menkes/Per/III/2010 tentang Tenaga Kesehatan	Dinas Kesehatan	Kepala Dinas Kesehatan
17	PENGOBATAN TRADISIONAL	- Permenkes Nomor 0072012 tentang Registrasi Obat Tradisional	Dinas Kesehatan	Kepala Dinas Kesehatan
18	OPTIKEL	- Kepmenkes Nomor 1424/Menkes/SK/XI/2002 tentang Penyelenggaraan Optik	Dinas Kesehatan	Kepala Dinas Kesehatan
19	PENYALUR ALAT KESEHATAN	- Permenkes Nomor 1191/Menkes/Per/VII/2010 tentang Penyaluran Alat Kesehatan	Dinas Kesehatan	Kepala Dinas Kesehatan
20	PIRT	- Peraturan Kepala BPOM Nomor HK.03.123.04.12.2205 tahun 2012	Dinas Kesehatan	Kepala Dinas Kesehatan
21	SERTIFIKAT HYGIENE SANITASI RUMAH MAKAN DAN RESTORAN	- Kepmenkes Nomor 1098 tahun 2003 tentang Persyaratan Hygiene Rumah Makan dan Restoran	Dinas Kesehatan	Kepala Dinas Kesehatan
22	DEPO AIR MINUM	- Permenkes Nomor 1205 Tahun 2004 tentang Pedoman Peryaratan Kesehatan Pelayanan SPA	Dinas Kesehatan	Kepala Dinas Kesehatan
23	HYGIENE SANITASI DAN JASA BOGA	- Kepmenkes Nomor 715 tahun 2003 tentang Persyaratan Hygiene Sanitasi Jasaboga	Dinas Kesehatan	Kepala Dinas Kesehatan
24	DOKTER UMUM/DOKTER SPESIALIS/DOKTER GIGI	- Permenkes Nomor 2052 / Menkes / Per / X / 2011 tentang Izin Praktek dan Pelaksanaan	Dinas Kesehatan	Kepala Dinas Kesehatan
25	BIDAN	- Permenkes Nomor 1464 / Menkes / Per / X / 2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan		Kepala Dinas Kesehatan

26	PERAWAT	- Permenkes Nomor HK.02.02/Menkes/148/I/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat	Dinas Kesehatan	Kepala Dinas Kesehatan
27	PERAWAT GIGI	- Permenkes Nomor 58 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perawat Gigi	Dinas Kesehatan	Kepala Dinas Kesehatan
28	PEDAGANG BESAR FARMASI	- Permenkes Nomor 1148/Menkes/Per/VI/2011 tentang Pedagang Besar Farmasi	Dinas Kesehatan	Kepala Dinas Kesehatan
29	APOTEKER	- Permenkes Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian	Dinas Kesehatan	Kepala Dinas Kesehatan
30	ASISTEN APOTEKER	- Permenkes Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian	Dinas Kesehatan	Kepala Dinas Kesehatan
31	FISIOTERAFIS	- Kepmenkes Nomor 1363/Menkes/SK/XII/2001 tentang Registrasi dan Izin Praktek Fisioterapis	Dinas Kesehatan	Kepala Dinas Kesehatan
32	TEHNISI GIGI	- Permenkes Nomor 54 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Teknis Gigi	Dinas Kesehatan	Kepala Dinas Kesehatan
33	OKUPASI TERAPIS	- Permenkes Nomor 548 / Menkes / Per / V / 2007 tentang Registrasi dan Izin Kerka Okupasi	Dinas Kesehatan	Kepala Dinas Kesehatan
34	REFRAKSIONIS OPTISIEN	- Kepmenkes Nomor 544 / Menkes / SK / V I/2002 tentang Regristrasi dan Izin Kerja Refraksionis Opristen	Dinas Kesehatan	Kepala Dinas Kesehatan
35	TENAGA GISI	- Permenkes Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi	Dinas Kesehatan	Kepala Dinas Kesehatan

36	PEREKAM MEDIS	<ul style="list-style-type: none"> - Permenkes Nomor 25 Tahun 2013 tentang Pedoman Rekrutmen PKHL 	Dinas Kesehatan	Kepala Dinas Kesehatan
37	IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	<ul style="list-style-type: none"> - UU Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian 	Diskop UKM	Kepala Diskop UKM
38	SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA (STPW)	<ul style="list-style-type: none"> - Permendag Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional - Perpres Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern 	Disperindag	Kepala Disperindag
39	IZIN USAHA PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL (IUP2T)	<ul style="list-style-type: none"> - Permendag Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional - Perpres Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern 	Disperindag	Kepala Disperindag
40	IZIN USAHA PUSAT PERBELANJAAN (IUPP) UNTUK PERTOKOAN	<ul style="list-style-type: none"> - Permendag Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional - Perpres Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern 	Disperindag	Kepala Disperindag
41	IZIN TRAYEK	<ul style="list-style-type: none"> - Perda Nomor 18 tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan dan Perkotaan - Kepmenhub Nomor KM 35 tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dijalan 	Dishub	Kepala Dishub

42	IZIN USAHA ANGKUTAN	- Kepmenhub Nomor KM 35 tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dijalan	Dishub	Kepala Dishub
43	IZIN ISIDENTIL	- Perda Nomor 18 tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan dan Perkotaan - Kepmenhub Nomor KM 35 tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dijalan	Dishub	Kepala Dishub
44	PERPANJANGAN IMTA	- Perda Nomor 7 Tahun 2014 tentang Retribusi Perpanjangan IMTA	Disnakertans	Kepala Disnakertans
45	IZIN LEMBAGA LATIHAN KERJA	- Permen Nakertran Nomor 17/Men/VII/2007 tentang Izin Lembaga Latihan Kerja	Disnakertans	Kepala Disnakertans
46	PENGESAHAN WAJIB LAPOR KETENAGAKERJAAN DI PERUSAHAAN	- UU Nomor 7 tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenaga Kerjaan Di Perusahaan	Disnakertans	Kepala Disnakertans
47	PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL a. PAUD b. LKP c. PKBM d. RUMAH PINTAR e. MAJELIS	- Permen Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal - Perda no 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
II	PELAYANAN NON PERIZINAN			
1	SKKLH (SURAT KEPUTUSAN KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP)	- UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup - PP Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan - Permen Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan.	Badan Lingkungan Hidup	Kepala Badan Lingkungan Hidup
2	REKOMENDASI UKL- UPL	- UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Badan Lingkungan Hidup	Kepala Badan Lingkungan Hidup

		<ul style="list-style-type: none"> - PP Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan - Permen Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan. 		
3	SPPL (PERNYATAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP)	<ul style="list-style-type: none"> - UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup - Permen Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan. 	Badan Lingkungan Hidup	Kepala Badan Lingkungan Hidup
4	REKOMENDASI PENATAAN LAHAN	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Bupati Tabanan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan Meneral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Tabanan 	Badan Lingkungan Hidup	Kepala Badan Lingkungan Hidup
5	PEMBERIAN REKOMENDASI LOKASI PENDIRIAN KILANG	<ul style="list-style-type: none"> - Keputusan Bupati Tabanan Nomor 69 tahun 2004 tentang Ketentuan Perjanjian Penyimpanan Bahan Bakar Minyak di Kab. Tabanan 	Bagian Sumber Daya Alam Setda kab. Tabanan	BPMPD
6	TANDA DAFTAR PETERNAKAN RAKYAT	<ul style="list-style-type: none"> - Kepmentan Nomor 404/KPST/OT.210/2002 tentang Pedoman Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan 	Dinas Peternakan	Kepala Dinas Peternakan
7	BERITA ACARA PEMERIKSAAN (BAP) ANGKA PENGENAL IMPORT)	<ul style="list-style-type: none"> - Permendag Nomor 27/M-DAG/PER/5/2012 tentang Ketentuan Angka Pengenal Impor (API) 	Diskoperindag	Kepala Diskoperindag
8	REKOMENDASI PERUBAHAN RIS USAHA INDUSTRI (IUS)	<ul style="list-style-type: none"> - Permen Perindustrian RI Nomor 71/M?IND/PER/7/2012 tentang Pengendalian dan Pengawasan Industri Nimuman Beralkohol 	Diskoperindag	Kepala Diskoperindag

9	BERITA ACARA PEMERIKSAAN ASPEK LEGALITAS DAN FISIK	- Permendag Nomor 64/M-DAG/PER/10/2012 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan	Diskoperindag	Kepala Diskoperindag
10	BERITA ACARA PEMERIKSAAN LAPANGAN MINUMAN BERALKOHOL	- Permendag Nomor 11/M-DAG/PER/3/2012 tentang Minuman Beralkohol	Diskoperindag	Kepala Diskoperindag
11	REKOMENDASI BBM BERSUBSIDI	- Perpres Nomor 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar tertentu - Kemenhub Nomor KM 35 tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dijalan	Diskoperindag	Kepala Diskoperindag
12	REKOMENDASI PENDIRIAN MENARA TELKOMUNIKASI	-	Dishub	Kepala Dishub
13	REKOMENDASI NUMPANG UJI	- PP Nomor 44 tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi	Dishub	Kepala Dishub
14	KARTU TANDA BUKTI PENDAFTARAN PENCARI KERJA	- Permenkertrans Nomor 207/MEN/1990 tentang Sistem Antar Kerja	DISNAKERTRANS	KEPALA DISNAKERTRANS
15	REKOMENDASI PEMBENTUKAN KANTOR CABANG PPTKIS	- Permenkertrans Nomor 09/MEN/2009 tentang Tata Cara Pembentukan Kantor Cabang Pelaksana Penempatan TKI Swasta	DISNAKERTRANS	KEPALA DISNAKERTRANS
16	REKOMENDASI PASFOR	-	DISNAKERTRANS	KEPALA DISNAKERTRANS
17	PENGESAHAN DAN PENDAFTARAN PERATURAN PERUSAHAAN	- Permenkertrans Nomor 16/MEN/XI/2011 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian	DISNAKERTRANS	KEPALA DISNAKERTRANS

		Kerja sama		
18	PENCATATAN SERIKAT KERJA	- Kepmenkertrans Nomor 16/MEN/XI/2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja /Serikat Buruh	DISNAKERTRANS	KEPALA DISNAKERTRANS
19	PENCATATAN LKS BIPARTIT	- Permenkertrans Nomor 32/MEN/XII/2008 tentang Tata Cara Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Lembaga Kerjasama Bipartit.	DISNAKERTRANS	KEPALA DISNAKERTRANS
20	PENDAFTARAN PERJANJIAN PEMBORONG PEKERJAAN	- Permenkertrans Nomor 19/2012 tentang Syarat Outsourcing	DISNAKERTRANS	KEPALA DISNAKERTRANS
21	PENGESAHAN PEMAKAIAN ALAT PENYALUR PETIR	- Permenker Nomor 02 tahun 1989 tentang Pengawasan Instalasi Penyalur Petir	DISNAKERTRANS	KEPALA DISNAKERTRANS
22	REKOMENDASI KETENAGAKERJAAN UNTUK MELENGKAPI ADMINISTRASI GUNA PENERBITAN NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI (NPPBKC)	- Permenker Nomor 02 tahun 1990	DISNAKERTRANS	KEPALA DISNAKERTRANS
23	REKOMENDASI IZIN PENYOSOHAN GABAH	- PP Nomor 65 tahun 1971 tentang Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras	Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultural	Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultural
24	REKOMENDASI TEKNIS PENYALURAN KREDIT KETAHANAN	- Permentan Nomor 8/Permentan/KU.340/2/2011 tentang perubahan kedua Permentan Nomor 57/Permentan/KU.340/7/2007 tentang pedoman pelaksanaan kredit Ketahanan Pangan dan Energi	Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultural	Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultural
25	REKOMENDASI PENDISTRIBUSIAN	- Perpres Nomor 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual	Dinas Pertanian, Tanaman Pangan	Kepala Dinas Pertanian,

	BBM BERSUBSIDI USAHA	Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis BBM	dan Holtikultural	Tanaman Pangan dan Holtikultural
26	REKOMENDASI RUANG	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang - PP No. 26 Tahun 2008 tentang RTRWN - Permendagri No. 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah - Perda No. 16 Tahun 2009 tentang RTRW Provinsi 	Bappeda	KEPALA Bappeda

PENJABAT BUPATI TABANAN

TTD

I WAYAN SUGIADA